

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Biro

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata Biro sebagai kantor. Biro adalah bagian dari instansi yang mengurus satu urusan. Perlengkapan suatu unit kerja dalam instansi yang mengurus masalah perencanaan dan perlengkapan instansi tersebut.⁶

1. Biro Dalam Perspektif Organisasi Umum

Dalam suatu Organisasi, biro mempunyai tugas untuk membantu administrasi umum dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pengoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas Perangkat, pemantauan atau evaluasi pelaksanaan kebijakan,⁷ mengoordinasikan pembinaan dalam penatalayanan organisasi, tata laksana, dan jabatan-jabatan fungsional pada satuan organisasi. Untuk melaksanakan fungsi, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan merumuskan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan strategi organisasi dan proses bisnis.

⁶<https://kbbi.web.id/biro.html> (12-12-2021)

⁷<https://ro-organisasi.jatimprov.go.id> (24-02-2022)

- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan atas strategi organisasi, system pemerintahan, penataan organisasi, tata laksana, analisis dan evaluasi jabatan, jabatan fungsional dan pelayanan publik.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas strategi organisasi, system pemerintahan, penataan organisasi, tata laksana, analisis dan evaluasi jabatan, jabatan fungsional, dan pelayanan publik.
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, organisasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan kinerja dan risiko, dan kehumasan biro organisasi dan ketatalaksanaan.⁸

2. Biro Dalam Organisasi Gereja

Biro dalam organisasi gereja, mencakup tentang bidang-bidang pelayanan dalam gereja, antara lain: administrasi, komunikasi/hubungan jemaat, perencanaan, dan lain-lain. Secara umum, Biro dalam organisasi gereja adalah untuk mewujudkan panggilan gereja, mengembangkan hidup rohani gereja atau jemaat untuk membuktikan pelayanannya di tengah-tengah Jemaat berdasarkan tugas masing-masing dari bidang yang dimaksud. Biro dibentuk sebagai badan pembantu atau pelengkap dalam

⁸<https://setjen.kemenkeu.go.id>(24-02-2022)

lingkungan sekretariat, yang membantu pimpinannya dalam memenuhi dan meningkatkan pelaksanaan tugas panggilan dan suruhan gereja.⁹

Dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (PGIW Sulselbara) dalam menjalankan program, mereka fokus pada dua fungsi yaitu fungsi mempersatukan gereja anggota dan melakukan kemitraan baik kepada gereja non PGI, lembaga Agama lain, dan juga dengan Pemerintah. Untuk menjalankan program tersebut, maka PGIW Sulselbara membentuk bidang-bidang biro dengan program-program sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya komitmen pada pelaksanaan pendidikan Kristiani yang holistik dan berkualitas
- b. Melakukan pendalaman mengenai berbagai aspek dan isu dalam kehidupan gereja dan masyarakat, antara lain melalui berbagai seminar yang terkait dengan Keesaan gereja, sejarah, transformasi budaya, lingkungan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
- c. Mendorong penyiapan dan pengkaderan para pemimpin masa depan di dalam gereja, dan dalam berbagai bidang: pendidikan, social ekonomi, politik dan lain-lain.

⁹<https://gkpa.wordpress.com>(16-03-2022)

- d. Berbagai lomba yang mendorong karya-karya kreatif, penulisan, lagu, pengetahuan, pendalaman Alkitab, dan lain-lain.¹⁰

B. Organisasi Gereja

Seperti diketahui bahwa Organisasi pada dasarnya merupakan perkumpulan atau tempat dimana terdapat berbagai orang yang saling bahu membahu dalam mencapai suatu tujuan yang sama. Hal yang sama dengan organisasi dalam gereja, yang mempunyai tujuan yang sama yaitu bertujuan untuk mengembangkan pelayanan dan mempererat spiritualitas terhadap Tuhan, dan juga mengurus urusan-urusan gerejawi.¹¹

Tujuan utama organisasi gereja adalah menjadi tempat untuk panggilan dan menolong dalam pengudusan. Pemberitahuan Injil dan penetapan pelayanan pengajaran dimaksudkan untuk membangunkan iman dan meningkatkan pengudusan bersama para anggota komunitas gerejawi dengan meletakkan bagi mereka apa yang disebut Calvin sebagai “Konsensusiman” yaitu sebuah kesepakatan yang bulat dalam iman dan tatanan lahiriah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “gereja” dipakai untuk mengacukan dua hal: Persekutuan orang-orang Kristen, dan

¹⁰Kerangkaacuan program PGIW Sulselbara, 1-3

¹¹Pappalan, *Kajian Teologis Katekismus Heidelberg Yang Historis Dan Kontekstual*, 78.

gedung yang didalamnya mereka berkumpul. Dalam ilmu dogmatik, kata “gereja” dipakai untuk menunjukkan konsep “gereja”, bukan sebagai gedung melainkan sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.¹² Mengenai sakramen-sakramen, fungsi utamanya adalah untuk memelihara iman orang-orang percaya dan dengan demikian berkontribusi untuk pengudusan pribadi mereka.¹³

Dalam menjalankan organisasi, semuanya harus berjalan dengan sopan dan teratur (1 Korintus 14:40). Karena bagaimanapun juga Allah adalah Allah yang tertip, Dia melakukan penciptaan dengan memperlihatkan ketertiban yang sangat luar biasa serta sempurna.¹⁴ Gereja merupakan tempat atau wadah manusia bertemu dengan Firman Allah, baik melalui pemberitaan Firman Allah, maupun melalui sakramen-sakramen, yang dianggap Firman yang kelihatan. Persekutuan yang dikumpul Kristus untuk mendengar FirmanNya.¹⁵ Sebagaimana Allah telah menggunakan sarana berupa inkarnasi Anak-Nya untuk mengembalikan hubungan yang rusak dengan manusia yang telah jatu kedalam dosa, Allah juga menggunakan sarana-sarana duniawi dalam melanjutkan pengudusan bagi manusia yang

¹²Jan A. Boersema Dkk, *Berteologi Abad 21* (PT Sulu Cendekia anggota IKAPI, 2015), 759.

¹³Francois Wendel, *Calvin : Asal Usul Dan Perkembangan Pemikiran Religiusnya* (Surabaya: Momentum, 2015), 332.

¹⁴Jhon White, *Kepemimpinan Yang Handal* (yayasan Kalam Hidup, 2001), 40.

¹⁵Dejonge Kristian, *Apa Itu Calvinisme* (Jakarta: Gunung Mulia, 2015), 99.

sudah diberikan karunia iman. Sarana duniawi dan manusiawi ini terdiri atas fungsi-fungsi dan jabatan yang berbeda yang telah ditanamkan dalam gereja.

Dengan pengertian ini, telah dipahami mengenai gereja dengan institusi ilahi, bukan hanya karena gereja adalah kumpulan orang yang percaya, tetapi juga karena pelayanan-pelayanan dan fungsi-fungsi yang telah diembankan kepada gereja.¹⁶ Gereja itu merupakan perkumpulan orang-orang yang berdosa, walaupun sudah ditebus tetapi senantiasa perlu diingatkan oleh Tuhannya untuk mempertahankan dan kembali pada hal-hal yang benar.¹⁷

Gereja dapat dianggap sebagai tempat pertemuan dengan Allah, dimana Firman Allah diberitakan didalamnya. Maka, gereja adalah persekutuan orang yang mendengar dan mendengarkan firman itu. Bukan kelompok orang yang seagama karena sedarah, atau yang memiliki pengertian dalam-dalam mengenai hal-hal rohani, atau yang berkumpul di sekitar salah seorang manusia sebagai wali Kristus.¹⁸

Melalui gereja orang percaya menjadi milik Kristus, menjadi kepunyaan Kristus, dan ikut mendapat keselamatan yang didatangkanNya dan dalam

¹⁶Wendel, *Calvin : Asal Usul Dan Perkembangan Pemikiran Religiusnya*, 333.

¹⁷G. P.H Locher, *Tata Gereja-Gereja Protestan Di Indonesia* (Jakarta: Gunung Mulia, 1997), 218.

¹⁸Agustinus M.L Batlajery, *Ekleisia Revormata Semper Reformanda* (Jakarta: Gunung Mulia, 2015), 124.

kebahagiaan yang kekal.¹⁹Jika dalam pengakuan iman Rasuli mengaku bahwa percaya akan gereja, maka yang dimaksud tidak hanya gereja yang kelihatan, tetapi juga semua orang pilihan Allah, termasuk juga yang sudah mati.²⁰Gereja itu dinamakan “Am” sebab tidak mungkin didapati dua atau tiga gereja tanpa membuat Kristus terbagi, yang berdiri di bawah suatu Kepala, semakin berpadu, seolah-olah menjadi satu tubuh dan saling bersangkutan bagaikan anggota-anggota satu tubuh.

Gereja atau organisasi gereja betul-betul dibuat menjadi satu, karena mereka hidup bersama dalam satu iman, pengharapan, dan kasih, oleh Roh Allah yang sama. Gereja merupakan persekutuan orang-orang yang khudus. Maksudnya agar masing-masing hidup dalam kerukunan bersaudara dengan semua anak Allah. Maka timbullah sosok gereja dengan jelas di depan mata.

Sebab sekali-kali tidak usah diragukan bahwa dimana saja kita lihat Firman Allah diberitakan dengan murni dan didengarkan, dan sakramen-sakramen di layangkan menurut peraturan Kristus, disana ada gereja Allah. Karena janji-Nya tidak akan mungkin berdusta: “dimana dua atau tiga orang

¹⁹Yohanes Calvin, *Institutio : Pengajaran Agama Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, n.d.), 225.

²⁰Ibid., 226.

berkumpul dalam nama-Ku, disitu aku ada di tengah-tengah mereka” (Mat. 18:20)

C. Teologi Calvin

Calvin adalah orang yang berperawakan sedang, mukapucat, dan bermata tajam. Tatapan yang hidup menyatakan bahwa ia memiliki otak luarbiasa cerdas. Ketika berada di Kolose di Paris itu, Calvin belajar retorika, logika, dan seni topik-topik umum pada zaman itu dan menerima pendidikan klasik.²¹

Teologi Calvin sangat menonjolkan Allah adalah pribadi (dulu dipakai istilah “Oknum”). Sebagai pribadi, Allah dikenal dengan istilah-istilah, seperti Bapa, Raja, Hakim, dan lain-lain. Calvin memakai Allah tidak dalam arti kuasa seperti agama-agama suku, atau wawasan abstrak seperti ideologi-ideologi. Juga tidak dipakai sebagai “Yang Maha Ada” seperti Teologi skolastik pada Abad pertengahan. Menurut Calvin, Allah adalah pribadi yang berkarya dalam kemuliaan-Nya ditengah dunia. Ia memanggil orang-orang agar menghadap dan bertemu dengan-Nya dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena Alkitab meyakinkan tentang Yesus Kristus maka Alkitab menjadi tempat pertemuan orang percaya dengan Allah. Hanya

²¹David W. Hall, *Calvin Dirana Publik* (Surabaya: Momentum, 2011), 55.

orang-orang yang bersekutu dengan Firmanlah yang bertemu dengan Allah.²²

Calvin memandang bahwa manusia tidak bertolak dari individu. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu hidup dalam persekutuan. Naluri manusia selalu mendorongnya untuk bersekutu dan memelihara persekutuan. Sebagaimana anak-anak Allah, persekutuan itu harus dibangun dalam kerukunan seperti domba-domba dalam satu kawanan. Hidup gereja bukanlah sekedar bertemu dan berkumpul, melainkan persekutuan yang mempunyai wujud dan bentuk. Persekutuan seperti ini bukan hanya terjadi antara manusia dan sesamanya, tetapi juga dengan Tuhan. Dalam rangka mewujudkan persekutuan yang “bukan berasal dari dunia, namun berada di dunia ini”²³

Calvin juga memandang tentang kebebasan yang pada dasarnya melanjutkan pandangan Luther. “Kebebasan itu adalah perhambaan yang bebas dan kebebasan yang menghamba”, demikian kata Calvin. Terhadap Allah, manusia memiliki kebebasan karena panggilan-Nya, tetapi pada saat yang sama manusia tidak bebas mengikuti keinginan sendiri. Orang percaya dikatakan bebas karena ia menerima hukum kasih yang mengaturnya dengan sukarela. Hal ini perlu diatur, termasuk kebebasan yang diperoleh

²²Batlaery, *Eklesia Revormata Semper Reformanda*, 4–5.

²³Ibid., 5.

karena panggilan Allah dalam Kristus. Calvin berusaha untuk kembali ke keadaan gereja zaman Perjanjian Baru.

Pada saat Calvin menjadi reformator kota Jenewa, ia pun menyusun karangan pengakuan iman (1537), berdasarkan katekismus yang ditulis olehnya untuk pendidikan iman. Pengakuan iman Calvin ini ditulis terutama untuk memenuhi kebutuhan setempat. Di dalam pengakuannya, Calvin mencantumkan pokok-pokok ajaran yang harus dipegang oleh mereka yang ingin menjadi anggota gereja di Jenewa yang telah di reformasikan. Warna Calvinis menjadi nyata dalam tempat khusus yang diberikan kepada hukum Allah, yang harus ditaati bukan untuk memperoleh keselamatan, melainkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah.

Dari seluruh tugas yang Calvin jalankan sebagai seorang reformator, teologi mungkin adalah yang termudah baginya, karena itu adalah salah satu tugas yang didasarkan pada berbagai talenta dan ketertarikan alaminya. Dia bagaikan mesin memproduksi petunjuk doctrinal dan eksposisi biblika. Calvin muncul sebagai theolog reformasi yang sangat terkenal dan karyanya tersebar luas.²⁴

²⁴Iain H.Murray Parsons, *John Calvin Sebuah Hati Untuk Ketaatan, Doktrin Dan Puji-Pujian* (Surabaya: Momentum, 2014), 49.

D.Sistem Presbiterial-Sinodal

Istilah Presbiterial Sinodal adalah sebuah istilah yang muncul dalam pemerintahan gereja. Presbiterial Sinodal sebagai asas penataan struktur organisasi dan pelayanan gereja dikembangkan oleh Johannes Calvin, sebagai salah satu upaya untuk membebaskan diri dari pola kepemimpinan Gereja yang hirarkhis pada abad pertengahan.²⁵

Sistem ini kemudian berkembang ke berbagai negeri di Eropa hingga ke Indonesia yang dibawah oleh bangsa Belanda. Sistem ini kemudian digunakan oleh gereja-gereja reform. Presbiterial Sinodal terdiri dari dua kata yang diambil dari bahasa Yunani. Kata Presbiterial adalah salah satu kata sifat dalam bahasa Yunani yang berarti tua-tua. Bentuk dasarnya adalah kata keadaan presbie yang berarti keadaan sebagai orang tua atau ketuaan seseorang. Dalam hubungannya dengan jabatan gerejawi istilah ini dipakai untuk jabatan penatua dalam bentuk kata benda presbyteros. Dari sinilah istilah presbyteros diwariskan kedalam kehidupan gereja dari abad keabad hingga sekarang dan lebih dikenal dengan istilah Presbiter. Khususnya di Indonesia istilah Presbyteros diterjemahkan dengan penatua atau tua-tua. Dengan asas presbyterial yang dimaksudkan ialah kehadiran, kedudukan,

²⁵ J.A. Telnoni, Gereja Berdasarkan Presbiterial Sinodal, (Kupang NTT: CV INARA, 2011),30

fungsi dan peran penatua-penatua sebagai pejabat gerejawi dalam menata dan menyelenggarakan pelayanan gereja. Para penatua yang dimaksudkan adalah mereka yang menerima jabatan gerejawi tersebut melalui pemilihan berdasarkan kriteria-kriteria Alkitabiah (Tit. 1:5-9; 1 Tim 3:1-13).²⁶

Kedua kata Sinodal, adalah kata sifat yang terbentuk dari dua kata Yunani. Yang satu adalah Syn yang berarti bersama-sama; dan yang lain adalah hodos yang berarti jalan. Jadi synode yang kemudian di Indonesia kan menjadi sinode berarti jalan bersama-sama. Bobot dari kebersamaan yang dimaksudkan di sini pertama-tama adalah persekutuan, yaitu soal sehati, sepikir, sebagai pelayan-pelayan yang menerima panggilan pelayanan dalam gereja Tuhan. Para penatua yang terpanggil masuk dalam satu badan pelayanan tidak hanya hadir bersama-sama di dalam satu badan pelayanan atau kepemimpinan dalam satu periode pelayanan, melainkan benar-benar mereka sehati, sepikir di dalam pelayanan yang mereka kerjakan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Sistem Presbiterial Sinodal, adalah penggabungan antara system presbiter dan sinodal. Dimana pengambilan keputusan tertinggi di jemaat-jemaat local berada di tangan Presbiter (Majelis Jemaat) dan pengambilan keputusan tertinggi dari semua jemaat-jemaat local

²⁶ Ibid, 16-19

berada ditangan sinode (Majelis Sinode).²⁷ Di mana gereja dipimpin oleh persidangan para pejabat gerejawi yang dinamakan sinode, yang merupakan instansi tertinggi yang keputusannya mesti dilakukan oleh jemaat-jemaat yang tergabung dalam sinode tersebut. Presbiterial Sinodal adalah pengaturan tata hidup dan pelayanan gereja yang dilaksanakan oleh para presbiteroi (pendeta, penatua dan syamas) dalam satu jemaat dengan keterikatan kepada kebersama-samaan dengan para presbiteroi dalam lingkup yang lebih luas (klasis, wilayah dan sinode).²⁸

Meskipun system Presbiterial Sinodal dikenal sebagai sistem yang berasaldari Calvin, tetapi diabukan orang yang satu-satunya menyusun atau yang menciptakannya. Dalam hal-hal tertentu, Calvin mengikuti atau bergantung pada orang-orang lain, seperti Luther, Zwingli, Oecolampadius, dan Bucer.²⁹ Sistem presbiterial-sinodal ini bukan saja dipikirkan secara praktis. Teolog-teolog yang kemudian telah berusaha untuk menguraikannya juga secara sistematis.

Tentang system atau susunan gerejawi ini terdapat berbagai perbedaan para ahli. Ada beberapa ahli yang kritis dalam menilainya. Tetapi ada juga Ahli yang menganggapnya sebagai suatu system atau

²⁷ J.L.Ch. Abineno, *Garis-garis Besar Hukum Gereja* (Jakarta: Gunung Mulia, 2003), 81

²⁸ Aleksander Mangonting, *Tata Gereja Toraja*, (Tana Toraja, Sulawesi Selatan: Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, 2003), 47

²⁹ J.L.Ch Abineno, *Garis-Garis Besar Hukum Gereja* (Jakarta: Gunung Mulia, 2003), 78.

susunan gerejawi yang paling baik dan benar, kalau dibandingkan dengan sistem-sistem atau susunan gerejawi yang lain. Mereka mengakui, bahwa sesudah reformasi orang tidak lagi menciptakan sesuatu yang samase kali baru di bidang organisasi gereja. Meskipun demikian, system presbiterial-sinodal ini bukanlah suatu system atau susunan gerejawi yang baru. Bahan-bahannya yang paling penting menurut para ahli-ahli itu diambil alih oleh penyusun-penyusunnya dari bahan-bahan yang terdapat dalam Perjanjian Baru dan dari peraturan-peraturan dalam abad-abad pertama.³⁰

Secara teori banyak gereja di Indonesia menggunakan system atau tatanan Presbiterial-sinodal untuk pelayanan mereka. Itu berarti, bahwa dalam tata gereja dan peraturan-peraturan gereja yang lain, mereka sadar atau tidak sadar mau bertolak dari Jemaat (gereja) setempat. Tetapi dalam praktek hal itu sering tidak terjadi. Sering mereka memulai tidak dari bawah, dari Jemaat setempat, tetapi dari atas, dari gereja sebagai keseluruhan dengan penekanan pada Majelis atau Badan Pekerja Sinode.

Hal itu bukan saja bertentangan dengan system presbiterial-sinodal, yang secara teoritis di gunakan, tetapi hal tersebut juga sebenarnya sangat merugikan gereja. Jemaat-jemaat (gereja-gereja) setempat tidak mendapat kesempatan untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab sendiri atas

³⁰Ibid., 79.

pelayanan mereka. Mereka fasif, mereka hanya menunggu perintah atau intruksi dari Majelis atau Badan Pekerja Majelis Sinode untuk melaksanakannya. Intruksi itu kadang-kadang balum mereka terima sesudah suatu waktu yang lama.

Dasar dari pemikiran presbiterial sinodal dapat dikatakan pimpinan atau pemerintahan gereja oleh Kristus sebagai Kepala dan Tuhannya. Kepala dari Tubuh-Nya dan Tuhan dari jemaatNya. Pimpinan atau pemerintahan ini berlangsung oleh pekerjaan Firman dan Roh-Nya. Yang dimaksudkan di sini dengan gereja ialah bukan saja gereja sebagai persekutuan tetapi gereja juga adalah suatu institute atau lembaga. Dalam pemerintahan gereja seperti yang diutarakan di atas bahwa Yesus merupakan kepala gereja dan Tuhannya, pimpinan dan pemerintahan Ia lakukan berdasarkan perantaraan pejabat gerejawi sebagai alat dan hamba-hamba Tuhan.

E. Ciri-Ciri Utama Sitem Presbiterial Sinodal

Adapun cirri khas yang utama dari system presbiterial-sinodal, adalah sebagai berikut.³¹ **Pertama:** Titik-tolaknya adalah Jemaat setempat. Hal ini yang membedakan system atau susunan presbiterial-sinodal dengan

³¹ J.L.Ch. Abineno, Jemaat, Ujud, Peraturan, Susunan, Pelayanan dan Pelayan-pelayanannya, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983), 40.

sistem-sistem gerejawi yang lainnya. Di situ bukan jemaat (gereja) sebagai titik tolak. Tetapi gereja seluruhnya (Gereja Universal).

Kedua: Pimpinan gereja diberikan kepada majelis, yang terdiri dari pejabat-pejabat gerejawi. Anggota-anggota dari majelis ini yang biasanya disebut majelis Jemaat terdiri dari pendeta, pengajar, penatua dan diaken. Mereka semua adalah pejabat gerejawi, yang mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua anggota majelis yang ada dalam jemaat mempunyai tugas masing-masing, yang dibentuk dalam peraturan jemaat masing-masing (gereja). Bersama-sama sebagai pejabat atau pelayan mereka bertanggung jawab atas pelayanan dalam Jemaat (gereja). Pejabat-pejabat Gereja ini bukanlah wakil-wakil dari jemaat melainkan orang yang memegang jabatan itu atas nama Tuhan Yesus Kristus dan berhadapan dengan jemaat.

Ketiga: Dalam sidang majelis jemaat, terdapat sidang-sidang yang lainnya dan luas cakupannya. Juga sidang-sidang gerejawi ini, antara lain sidang klasis dan sidang sinode terdiri dari wakil majelis-majelis Jemaat, yang juga merupakan pejabat-pejabat gereja. Sidang-sidang gerejawi ini tidak boleh kita anggap sebagai suatu badan pimpinan atau badan pemerintahan yang mandiri dan yang lebih tinggi dari pada Majelis Jemaat (gereja). Dapat dikatakan, bahwa semua wewenang dalam gereja dipegang oleh Kristus, dan

bahwa wewenang dari semua sidang baik majelis Jemaat (gereja), maupun sidang-sidang yang lain, bersifat melayani, rohani dan terbatas. Yang dimaksudkan disini dengan sifat terbatas ialah, bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam sidang-sidang itu tidak boleh bertentangan dengan Firman Allah. Ada gereja-gereja yang mengenal lebih banyak sidang; selain dari pada sidang majelis jemaat, sidang-sidang Klasis dan sidang-sidang Sinode, mereka juga mengenal sidang sinode daerah atau wilayah, sidang sinode am atau terpusat, dan sidang-sidang yang lainnya. Sidang sinode ini mempunyai wibawa yang sama dengan majelis Jemaat (gereja).

Keempat: Gereja mempunyai kemandirian terhadap pemerintah, terkhusus dalam tugas dan pelayanan pejabat-pejabat gereja. Pada zaman sekarang, dimana terjadi atau sedang terjadi perpisahan antara gereja dengan Negara, orang paling kurang mengharapkan, supaya pemerintah menghargai sifat yang khusus dalam gereja dan mengakui hak-hak dan keberadaannya.³² Tiap-tiap jemaat yang dipimpin oleh Majelis jemaat mempunyai kemandirian penuh, tetapi pada saat yang sama tiap-tiap jemaat yang ada berada dalam kesatuan dalam jemaat-jemaat lain dalam satu sinode sebagai wujud nyata berjalan bersama para Presbiter dalam memimpin gereja yang Tuhan percayakan kepada mereka.

³² J.L.Ch. Abineno, *Garis-garis Besar Hukum Gereja* (Jakarta: Gunung Mulia, 2003), 80-82

Kristus sebagai kepala hendak menunjuk bahwa Gereja tidak dapat dipisahkan dari Kristus dan Kristus merupakan orientasi gerejanya sekaligus menjadi prinsip hidup gereja (Ef 1:12, 4: 15, 5:23, kol 1:18).³³ Sungguhpun demikian, ahli-ahli (gereja-gereja) yang mengenal lebih dari pada satu Majelis, misalnya majelis Jemaat (gereja), Majelis Klasis, Majelis Sinode, dan lain-lain, mengatur hubungan antara Majelis-majelis itu begitu rupa, sehingga tidak merugikan Majelis Jemaat (gereja) setempat sebagai titik-tolak dari sistem Presbiterial-sinodal. Dalam sistem Presbiterial-sinodal, majelis Jemaat (gereja) setempat tidak berada di bawah Majelis Klasis atau Majelis Sinode, tetapi setingkat dengan kedua Majelis itu. Malahan dalam hal-hal tertentu, Majelis Jemaat (gereja) mempunyai wewenang yang lebih luas di bidang-cakupnya. Sebab garis utama kebijakan presbiterial mengandung teguran untuk tetap berpegang pada asas dasar tata gereja presbiterial: tidak ada bentuk penguasaan apa pun dari suatu gereja atas gereja-gereja lain, suatu pelayanan atas pelayanan-pelayanan yang lain, satu penatua atau diaken, atas penatua dan diaken yang lain.³⁴

³³ Jacobs, *Gereja Menurut Perjanjian Baru*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 68.

³⁴ Locher, *Tata Gereja-Gereja Protestan Di Indonesia*, 235.

F. Penerapan Sistem Presbiterial Sinodal

Sistem Presbiterial Sinodal menegaskan bahwa setiap jemaat dapat melakukan pelayanannya sendiri yang dipimpin oleh pendetanya, termasuk memanggil pendeta yang dikehendakinya dan diteguhkan oleh presbiter yang terdiri dari pendeta, dan penatua untuk mewakili igereja-gereja lokal. Hal ini mempunyai implikasi positif yaitu jemaat mempunyai otonomi (kemandirian penuh) tetapi terbatas; yang membatasinya ialah sinode. Sebaliknya sinode mempunyai kekuasaan tetapi terbatas, yang membatasinya adalah jemaat-jemaat. Dalam system presbiterial sinodal semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama bukan berdasarkan wewenang yang ada pada salah satu pihak.³⁵

Prinsip dan mechanism Presbiterial dalam wadah sebuah jemaat sebagai Tubuh Kristus Nampak dalam hal saling membenahi dan memperbaiki, saling menasehati dan mengawasi, saling memperhatikan dan meneladani, saling menopang dan menguatkan. Memimpin sebuah jemaat Tuhan berarti mengembalakan jemaat itu untuk menjadi dewasa³⁶ Penyelenggaraan pelayanan sistem presbiterial sinodal hendaknya menjadi

³⁵Sinode GPIL, (Palopo Sulawesi Selatan: MajelisPekerjaSinode GPIL, n.d.), 4

³⁶ <https://docplayer.info/37320059>,

Kepemimpinangerejadalamkontekspresbiterialsinodal

tanggung jawab bersama para presbiter atas kehidupan Lembaga jemaat berdasarkan karunia dan talenta yang dipercayakan Tuhan kepadanya.

G. Jenis-Jenis Sistem Pemerintahan Gereja

Yang dimaksud dengan system pemerintahan gereja adalah tata cara yang dipakai untuk mendasari pengorganisasian atau pemerintahan di gereja. Ada beberapa model system pemerintahan gereja yaitu:

1. Sistem Papal.

Sistem papal adalah system pemerintahan yang diterapkan dalam oleh Gereja Roma Katolik (Agama Katolik). Istilah papal berasal dari kata papas yang artinya bapa. Dari pengertian papas inilah kemudian dikenal dengan istilah Paus. Dalam system ini Paus sebagai pemimpin tertinggi dan berkedudukan di Vatikan Roma. Kekuasaan Paus diakui secara definitif pada Konsili Vatikant ahun 1870.³⁷ Strukturnya berdasarkan wilayah kekuasaan yaitu Paus di Roma, Kardinal di setiap negara, uskup di setiap Propinsi, dan Pastor bertugas di Paroki atau jemaat lokal.

Pengaruh kekuasaan Paus pada saat itu berdampak pada setiap keputusan yang ditetapkannya dalam Gereja. Paus dianggap sebagai

³⁷ Louis Berkhof, Teologi Sistematis 5, Doktrin Gereja (Surabaya: Lembaga Reformed Injil Indonesia, 1997), 37

pengganti Rasul Petrus dan wakil Kristus di dunia ini. Paus merupakan pimpinan tertinggi menjadi pengantara antara manusia dengan Kristus. Pandangan mereka berdasarkan pada Injil Matius 16:13-19, di mana Paus diakui sebagai pengganti Petrus dengan alasan bahwa Petrus itu kepala rasul-rasul.

Konsekuensi dari pemahaman ini menganggap Paus tidak dapat bersalah bila menerapkan pengajaran. Pengajarannya berlaku mutlak dan tidak dapat diubah. Dalam keputusan Konsili Vatikan tahun 1870 menegaskan bahwa siapa yang menyangkal setiap keputusan Paus akan dikutuk. Sistem papal berbentuk hierarkis atau susunanya bertingkat. Hierarkis terdiri atas dua kata yaitu hieros berarti imam dan archein berarti memerintah. Di bawah Paus ada majelis Kardinal yang berjumlah 70 orang. Ketujuh puluh orang Kardinal disebut majelis Kardinal yang salah satu tugasnya memilih Paus dalam tempat yang tertutup yang disebut Conclaf.

2. Sistem Caesaropapal.

Sistem Caesar merupakan sebuah system pemerintahan gereja yang berada di bawah kekuasaan seorang raja. Model system ini dapat kita lihat di dalam gereja Yunani yang Ortodoks. Dalam hal ini negara memberikan perlindungan kepada gereja, namun negara juga mempunyai hak untuk mengatur dan mencampuri segala urusan dalam gereja. Segala keputusan

dalam gereja berada di tangan pemerintah. Orang yang pertama kali menerapkan system ini yaitu Caesar Constantinus Agung pada permulaan abad ke-4. Perkembangan system ini juga sebagian gereja Anglikan dan beberapa gereja Lutheran di Norwegia menggunakannya.

3. Sistem Episcopal.

Episkopos merupakan system yang dilahirkan oleh gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru.³⁸ Sebelum membahas tentang gaya kepemimpinan episcopal perlu untuk menelusuri kata episcopal dalam bingkai episkopos. Istilah *Episkopos* misalnya muncul dalam **Kisah Para Rasul 20:20**, yang artinya gembala, penilik, dan pada akhirnya penilik ini yang mendapat penekanan dalam pengertian Roma Katolik yang akhirnya menjadi Bishop.³⁹

Dapat juga dikatakan bahwa system episkopal ini adalah suatu system kepemimpinan gereja yang pucuk pimpinannya dipegang oleh seorang Bishop.⁴⁰ Dalam buku Abineno dijelaskan bahwa bishop dalam system episkopal ini mempunyai kuasa atas pendeta-pendeta dan diaken-diaken. Jabatan episkopal mula-mula merupakan suatu jenis jabatan dari penilik jemaat dan penatua (band. Kis. 20:17,28 dan Tit. 1:5,7) dan kemudian jabatan episkopos makin lama makin menjadi satu-satunya pemimpin

³⁸J.I. Ch. Abineno, *Garis-garis Besar Hukum Gereja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 51

³⁹E. P. GIntings, *Apakah Hukum Gereja*, (Bandung: Jurnal Info Media, 2009), 68

⁴⁰Jahenos Saragih, *Manajemen Kepemimpinan Gereja*, (Jakarta: Suara GKYE, 2008), 246

jemaat, sehingga jabatan uskup (bishop) berkembang menjadi jabatan yang berkuasa. Presbiter-presbiter dan diaken-diaken tidak boleh melakukan sesuatu tanpa izin dari uskup, sebab kepadanya lahumat Tuhan dipercayakan dan ialah yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa mereka.⁴¹

Pada zaman Perjanjian Baru jemaat-jemaat, baik di Palestina maupun di luar Palestina dipimpin oleh rasul-rasul. Sewaktu rasul-rasul tidak ada lagi, jemaat mulai mengalami kesulitan. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat kafir yang mempengaruhi segala bidang kehidupan. Dalam situasi sulit seperti ini mereka membutuhkan seorang pemimpin rohani yang kuat bagi jemaat-jemaat mereka dan suatu penjagaan yang cermat terhadap kekudusan hidup mereka. Atas dasar inilah memimpin kepada suatu perkembangan dimana pejabat-pejabat, yaitu episkopos-episkopos dan penatua-penatua yang dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam jemaat.⁴²

Dalam rangka mengemban tugas tanggungjawab kepemimpinan, uskup bertugas mengawasi kehidupan rohani gereja dan jalannya roda administrasi dan organisasi gereja. Dalam sistem kepemimpinan gereja, kuasa tidak berpusat di tangan satu orang saja, melainkan dipegang oleh sekelompok orang yang secara kolektif seperti dewan bishop, konferensi dan

⁴¹J.L. Ch. Abineno, *Garis-Garis Besar Hukum Gereja*, (Jakarta: B PK-GM, 2003), 51-53

⁴²Ibid, hlm. 50-51

badan-badan konferensialainnya. Tugas terpenting seorang uskup (bishop) merupakan wujud dari episkopalisme yaitu membuat penempatan pendeta untuk melayani suatu gereja atau Lembaga terkait kendati proses penempatan ini di godok melalui konsultasi dalam cabinet dan konsultasi dengan pendeta bersangkutan, namun hasil keputusan terakhir ada ditangan uskup.⁴³ Uskup sangat terkait dengan posisi yang ditempatkan lebih tinggi, sehingga jabatan mulai diutamakan dalam gereja, dan kesewenangan yang meleburkan aspek-aspek kesederajatan, inilah herarki dari bentuk pemerintahan di kemudian hari.⁴⁴ Hal ini merupakan kelemahan dari sistem ini, dimana ketika makna dari kata pengawas dipahami sebagai sebuah jabatan yang dibentuk atas dasar herarki jabatan, dipahami dan dijalankan sebagai bentuk kekuasaan yang mutlak dan kesewenangan.⁴⁵ Hal ini adalah sesuatu yang wajar, karena sudah jelas bahwa setiap sistem atau susunan organisasi pastilah mempunyai kelemahan dan kelebihan. Walaupun sistem ini mempunyai kelemahan tetapi masih banyak hal positif yang ada didalamnya dalam rangka pengembangan gereja, oleh karena itu sampai saat ini masih ada gereja yang menganut sistem ini.

⁴³Richard M. Daulay, *Kekristenan dan Kesukubangsaan*, (Yogyakarta: Taman Pusaka Kristen, 1996),78-7

⁴⁴H. Berkhof, *Sejarah Gereja*, (Jakarta: BPK-GM, 2007),10

⁴⁵SahatMartuaLumbantobing, *Op.cit.*,170-174

4. Sistem Collegial.

Sistem Collegial merupakan sistem gereja yang didasarkan pada hubungan pertemanan. Istilah Collega sendiri dapat berarti teman atau persekutuan. Segala kekuasaan terletak di tangan anggota gereja yang memilih pengurusnya, sehingga segala keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak dalam bentuk demokrasi. Walaupun keputusan yang dihasilkan bertentangan dengan kehendak Kristus, tetapi harus dilaksanakan oleh semua anggotanya. Dasar keputusan yang diambil biasanya lebih bersifat sekuler dan bukan Alkitabiah.

5. Sistem Kongregasional.

Sistem kongregasional adalah sistem pemerintahan gereja yang independen. Menurut Abineno sistem kongregasional merupakan paham yang dianut oleh Robert Parker berkebangsaan Inggris yang dipengaruhi oleh sekte Anabaptis. Pertama sekali orang-orang yang menganut paham ini memisahkan diri dari gereja Anglican dengan membentuk jemaat otonom.⁴⁶ Dalam perkembangannya, sistem kongregasional telah mengalami perubahan sebagai akibat dari konversi atau penggabungan berbagai sistem pemerintahan gereja secara modern. Berdasarkan konversi tersebut maka sistem kongregasional dibedakan dalam 3 kategori yaitu:

⁴⁶Abineno J.L CH. *Garis-garis Besar Hukum Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), 84.

- a. Kongregasional murni merupakan penggabungan lini dan staf. Pada umumnya sistem ini diterapkan oleh gereja-gereja baptis karena menolak sistem sinodal dimana ketua sinode sebagai pemimpin tertinggi pada tingkat rasional. Walaupun adanya penggabungan gereja baptis tetapi independensi (otonom) gereja lokal tetap menjadi ciri utama yang harus dipertahankan.
- b. Kongregasional sinodal merupakan penggabungan lini dan fungsional. Gereja ini menerima sistem kepengurusan gereja pusat, namun tetap mempertahankan otonomi masing-masing gereja lokal.
- c. Semi kongregasional sinodal adalah merupakan penggabungan sistem tipe lini, staf dan fungsional. Sistem ini biasanya dipakai oleh gereja-gereja yang beraliran Pentakosta. Walaupun sistem ini mendekati sistem kongregasional sinodal tetapi tidak memakai sinode. Sistem pemerintahan selalu diserahkan kepada pengurus pusat dan pengurusan daerah.

Dengan melihat beberapa kategori diatas, maka ciri yang paling kental terlihat dalam sistem kongregasional adalah pendeta terkesan sebagai pemilik gereja. Pada awal terbentuknya sebuah gereja ini selalu diawali oleh penginjilan pendeta atau penginjil. Segala kebutuhan dan kekurangan selama membuka gereja itu menjadi tanggung jawabnya secara pribadi. Makan ataupun tidak makan selama pelayanan menjadi resiko yang harus ditanggung oleh pendeta atau penginjil yang bersangkutan. Sifat otonom

terlihat jelas dalam setiap keputusan yang diambil oleh gereja lokal yang dipimpin oleh seorang pendeta. Serta sistem keorganisasian seakan diabaikan⁴⁷

6. Sistem presbiterial

Terbentuknya gereja dengan sistem Presbiterian tidak bisa dipisahkan dengan sejarah berdirinya gereja Presbiterian. Berdirinya gereja tidak bisa dipisahkan dari tokoh Gerakan Reformasi, yaitu John Calvin. Harus diketahui bahwa gereja-gereja protestan di dunia yang menganut ajaran John Calvin (aliran denominasi calvinis) lebih sering disebut Gereja Reformed atau Presbiterian.⁴⁸

Jhon Calvin dalam bukunya "Institutio" telah meletakkan dasar-dasar teoritis bagi sistem pemerintahan gereja. Calvin mengatakan bahwa kuasa Gereja, yang harus dianggap sebagian terletak pada penilik-penilik jemaat masing-masing, sebagian pada sinode-sinode, baik sinode wilayah maupun sinode am.⁴⁹ Sistem Presbiterian adalah bentuk pemerintahan gereja dimana kekuasaan tertinggi berada dalam tangan para penatua.⁵⁰ Di sisi yang lain sistem ini juga tidak menekankan suatu orang tertentu untuk secara

⁴⁷ Ibid, 84.

⁴⁸ Jan S. Aritonang, Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 25-26

⁴⁹ Yohanes Calvin, Institutio Prngajaran Agama Kristen, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 248

⁵⁰ F.D. Wellem, Kamus Sejarah Gereja (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 210

dominan memiliki otoritas secara tunggal. Otoritas pemerintahan dipegang oleh beberapa orang yang menjadi perwakilan untuk menjalankan kekuasaan itu. Pejabat penting di dalam pemerintahan Presbiterian terletak pada para penatua.⁵¹

H. Landasan Biblika

Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Kristus adalah kepala atas segala sesuatu. Ia adalah Tuhan atas alam semesta, bukan sekedar sebagai Pribadi kedua dari Tritunggal. Tetapi juga adalah keadaan-Nya sebagai pengantara (Mat. 28:18; Ef. 1:20-22; Fil. 2:10-11; Why. 17:14; 19:16) Kristus dalam pengertian yang khusus, Ia adalah kepala gereja dimana Gereja adalah tubuh-Nya. Ia berdiri dalam hubungannya yang sangat penting dan hidup dengan gereja, mengisi gereja dengan hidup-Nya dan mengatur gereja secara spiritual (Yoh. 15:1-8; Ef. 1:10, 22-23; 4:15, 5:30; Kol.1:18, 2:19, 3:11).

Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Kristus adalah Kepala Gereja, bukan saja dengan hubungannya yang vital dengan gereja, tetapi juga sebagai Legislator dan Raja. Iya juga Kepala bagi gereja yang nampak, Ia adalah pemegang otoritas dan memerintah atasnya. (Mat. 16:18-19, 23:8, 10; Yoh. 13:13; 1 Kor. 12:5; Ef. 1:20-23; 4:4-5, 11-12, 5:23-24). Beberapa surat rasuli

⁵¹ Millard J. Erickson, Teologi Kristen, Volume Tiga (Malang: Gandung Mas, 2004), 348-349

dalam Perjanjian Baru mencatat beberapa fungsi pelayanan dalam gereja perdana. Efesus 5:11-12 mencatatapa yang diyakini oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan Yesus sendiri memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus dan bagi pekerjaan dan pembangunan tubuh Kristus. Di sini disebutkan fungsi-fungsi dan bukan jabatan karena tekanan utamanya adalah untuk memperlancar kegiatan memperlengkapi warga jemaat, pekerjaan pelayanan dan pembangunan iman jemaat sebagai satu kesatuan.⁵² Bahkan informasi PB mengenai pelayan-pelayan dalam gereja terdapat dari surat-surat Rasuli, terutama dari rasul Paulus.⁵³

Kristus menerapkan alat-alat anugerah yang harus dillakukan oleh gereja yaitu firman dan sakramen (Mat. 28: 19-20; Mrk. 16:15-16; Luk. 22:17-20; 1 Kor. 11:23-29). Dalam hal ini tidak ada seorangpun yang berhak melakukan legilasi. Kristus memberikan gereja ketetapan-ketetapan serta para pejabat di dalamnya, lalu memberikan kepada pejabat itu, otoritas Ilahi sehingga mereka dapat berbicara dan bertindak dalam nama-Nya. (Mat. 10:1; 16:19; Yoh. 20:21-23; Ef. 4:11-12). Ia hadir dalam gereja ketika gereja sedang beribadah, dan Ia bertindak dan berbicara melalui pejabat gereja. Kristus

⁵²Robert P. Borrong, *Melayani Makin Sunggu* (Jakarta: Gunung Mulia, 2016), 46–47.

⁵³*Ibid.*, 47.

yang adalah Raja gereja, memungkinkan para pejabat gereja itu berbicara dan bertindak dengan otoritas (Mat. 10:40; 2 Kor. 13:3).⁵⁴

Alkitab dengan jelas melaporkan setelah para rasul memberitakan injil, maka terbentuklah jemaat-jemaat dan selanjutnya mereka menetapkan para penatua, penilik jemaat, dan diaken untuk mengurus kehidupan jemaat. Istilah penatua berasal dari Bahasa Yunani "*Presbiteros*" yang menekankan wibawa dan kematangan dari jabatan itu. Penatua memiliki otoritas untuk membagikan uang (Kis. 11:30); berotoritas untuk membuat keputusan tentang apa yang dimasukkan dalam doktrin ortodoksi (Kis. 15:2, 4, 6, 22; 16:2). Mereka harus dihormati (1 Tim. 5:17); namun mereka juga tidak boleh menjadi seorang yang dictator (1 Ptr. 5:1-3) dan mereka harus mengunjungi orang sakit dan berdoa bagi mereka, memberikan nasihat dan dorongan (Yak. 5:14).⁵⁵

⁵⁴ Louis Berkhof, *Teologi Sistematis* 5, *Doktrin Gereja* (Surabaya: Lembaga Reformed Injili Indonesia, 1997), 59-60

⁵⁵ Paul Enns, *The Moody Handbook Of Theology*, Jilid 1 (Malang: Literatur SAAT, 2003), 441.